

## POLITIK DINASTI JOKOWI DAN *GRAND CORRUPTION*

Sri Yulianty Mozin<sup>1</sup>, Rahmatia Pakaya<sup>2</sup>, Intan Juleyka Halid<sup>3</sup>, Dwi Rahmatia Nurkamiden<sup>4</sup>,  
Suci Novia Umar<sup>5</sup>, Nazwa Dita Djafar<sup>6</sup>, Sustri Abdurahman<sup>7</sup>, Aulia Djaba<sup>8</sup>, Fharel Putra Hiola<sup>9</sup>

<sup>1</sup>Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo  
[yulmozin@ung.ac.id](mailto:yulmozin@ung.ac.id)

<sup>2</sup>Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo  
[rahmatiapakaya@ung.ac.id](mailto:rahmatiapakaya@ung.ac.id)

<sup>3</sup>Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo  
[intanjuleykahalid01@gmail.com](mailto:intanjuleykahalid01@gmail.com)

<sup>4</sup>Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo  
[tiaranurkamiden525@gmail.com](mailto:tiaranurkamiden525@gmail.com)

<sup>5</sup>Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo  
[suciumar398@gmail.com](mailto:suciumar398@gmail.com)

<sup>6</sup>Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo  
[nazwaditadjafar31@gmail.com](mailto:nazwaditadjafar31@gmail.com)

<sup>7</sup>Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo  
[sustriabdurahman@gmail.com](mailto:sustriabdurahman@gmail.com)

<sup>8</sup>Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo  
[auliadjaba24@gmail.com](mailto:auliadjaba24@gmail.com)

<sup>9</sup>Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo  
[fharelhiola9@gmail.com](mailto:fharelhiola9@gmail.com)

### ABSTRAK

Fenomena politik dinasti dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo menimbulkan kekhawatiran serius terhadap munculnya patologi birokrasi dan praktik korupsi besar (*grand corruption*). Penelitian ini menganalisis keterlibatan anggota keluarga Presiden Jokowi dalam arena politik—seperti Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, dan Bobby Nasution—yang memunculkan indikasi penggunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga. Salah satu sorotan utama adalah perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran menjadi calon wakil presiden. Studi ini menggunakan pendekatan teori post-kolonial untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai tradisional seperti mitos raja Jawa masih memengaruhi persepsi publik dan struktur kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik dinasti tidak hanya melanggar etika demokrasi, tetapi juga berpotensi memperkuat korupsi terstruktur, merusak meritokrasi, dan mengancam keberlangsungan negara hukum.

**Kata kunci:** Politik Dinasti, *Grand Corruption*, Patologi Birokrasi, Post-Kolonial, Demokrasi, Mitos Raja Jawa

**ABSTRACT**

*The phenomenon of political dynasty during President Joko Widodo's administration raises serious concerns about bureaucratic pathology and grand corruption. This study examines the political involvement of Jokowi's family members—Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, and Bobby Nasution—as indicators of power being utilized for familial benefit. A key issue analyzed is the Constitutional Court's controversial decision that enabled Gibran's vice-presidential candidacy. Employing a postcolonial theoretical framework, the study explores how traditional values—such as the Javanese king myth—continue to shape public perception and power dynamics. The findings reveal that dynastic politics not only violate democratic ethics but also perpetuate structural corruption, undermine meritocracy, and pose a significant threat to the rule of law and democratic sustainability.*

**Keyword:** *Political Dynasty, Grand Corruption, Bureaucratic Pathology, Postcolonialism, Democracy, Javanese King Myth*

Submisi: 04-05-2025

Diterima: 04-05-2025

Dipublikasikan: 05-05-2025

## PENDAHULUAN

Fenomena politik dinasti telah lama menjadi sorotan dalam sistem demokrasi, khususnya ketika kekuasaan negara didominasi oleh satu kelompok keluarga. Di Indonesia, perhatian terhadap fenomena ini mencuat saat keluarga Presiden Joko Widodo secara progresif menduduki jabatan-jabatan strategis. Potensi penyalahgunaan wewenang, terbajaknya sistem demokrasi, hingga ancaman suburnya politik dinasti dinilai oleh pengamat politik akan mewarnai jalannya Pilpres 2024, menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia, (Mujani, 2023).

Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Bisa dilihat bahwa pemilu memberi ruang bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) saat bapaknya, Joko Widodo, masih menjabat dan berkuasa sebagai presiden pada waktu pemilihan, yaitu 14 Februari 2024. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan demokrasi dan munculnya praktik korupsi yang lebih terstruktur.

Masalah dinasti politik di Indonesia menimbulkan kekhawatiran yang signifikan mengenai kesehatan demokrasi dan pemerintahan. Munculnya putra Jokowi, Gibran Rakabuming, dan menantu laki-laki, Bobby Nasution, dalam peran politik kunci telah memicu perdebatan tentang nepotisme dan melanggengkan kekuasaan dalam keluarga elit, yang dapat menyebabkan korupsi dan menghambat proses demokrasi, (Fatimatuzzahra & Dewi, 2021).

Fenomena *grand corruption* yang melibatkan elite kekuasaan dalam skala besar memperkuat asumsi bahwa sistem birokrasi Indonesia belum sepenuhnya bebas dari patologi birokrasi. *Grand corruption* sebagai salah satu dari tiga jenis korupsi berdasarkan skala dan paparannya. Menurut Anti Corruption Learning Center (Pusat Edukasi Antikorupsi) atau disingkat ACLC KPK, bahwa korupsi memiliki berbagai bentuk dan jenis, yang dilakukan mulai dari tataran terendah hingga para penyelenggara negara dan anggota legislatif. Jika dibagi berdasarkan skala dampak dan paparannya, maka korupsi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *petty corruption*, *grand corruption*, dan *political corruption*. *Petty corruption* yaitu korupsi kecil-kecilan yang banyak terjadi di tengah masyarakat dan dianggap biasa, sedangkan *grand corruption* yaitu korupsi skala besar dengan kerugian negara yang masif dan merugikan masyarakat luas, sementara *political corruption* yaitu korupsi menggunakan jalan politik yang terjadi secara sistematis untuk mengeruk uang negara, (ACLC KPK, 2025).

Patologi birokrasi merujuk pada disfungsi sistemik dalam birokrasi yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, hingga lemahnya akuntabilitas publik. Dalam konteks ini, praktik politik dinasti di era Jokowi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk patologi birokrasi yang memiliki korelasi kuat dengan *grand corruption*. Studi ini dilakukan bertujuan untuk mengurai bentuk-bentuk patologi birokrasi yang terjadi dalam pemerintahan Jokowi, khususnya dalam konteks politik dinasti dan indikasi *grand corruption*.

## METODE

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menghimpun data dari berbagai sumber. Menurut Creswell, (2015) yang menyatakan bahwa kajian literatur adalah kumpulan artikel tertulis dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang menjelaskan teori dan informasi dari masa lalu maupun saat ini, dan mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang diperlukan dalam kajian penelitian.

Literatur yang peneliti jadikan objek penelitian tidak hanya sebatas pada buku-buku yang ada

kaitannya dengan politik dinasti, tetapi juga melalui jurnal, dan artikel, serta melalui opini-opini para ahli dan berita di media massa. Dari bahan studi pustaka yang diperoleh, peneliti melakukan analisis kritis yang mendalam untuk memvalidasi proposisi dan gagasan yang diusung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kronologi Munculnya Dinasti Jokowi

Keterlibatan anggota keluarga Jokowi dalam panggung politik nasional menunjukkan gejala politik dinasti yang mengkhawatirkan seperti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo hingga calon Wakil Presiden, serta Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan Bobby Nasution sebagai calon Gubernur merupakan figur-figur yang dipromosikan dalam konteks jaringan kekuasaan Jokowi. Hal ini menjadi problematis ketika pencalonan mereka didukung oleh intervensi politik melalui Mahkamah Konstitusi, seperti dalam kasus perubahan syarat usia calon presiden/wakil presiden yang membuka jalan bagi Gibran.

Polemik ini disorot oleh pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. King Faisal Sulaiman SH., LLM yang menyebut bahwa putusan ini sensitif dan beraroma politis sebab terkait dengan momentum Pilpres 2024 dan sarat akan konflik kepentingan. Ia menduga kuat hal ini berkaitan erat dengan kepentingan anak Presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo yang hendak maju sebagai calon wakil presiden berdampingan dengan Prabowo Subiyanto, tetapi sempat terhalang syarat secara konstitusional karena faktor usia, (Sulaiman, 2023).

“Ini tentu putusan yang agak kontroversial karena pertama putusan ini dibuat dalam dinamika momentum pilpres 2024. Kedua, kuat dugaan berkaitan dengan kepentingan anak presiden dalam hal ini Mas Gibran. Ketiga, yang lebih ironis lagi melibatkan pamannya mas Gibran yaitu ketua MK (Anwar Usman),” (Sulaiman, 2023).

Putusan soal batas usia capres-cawapres ini dinilai King akan sangat berdampak bagi tatanan demokrasi di Indonesia. Pertaruhan terhadap eksistensi dan marwah MK sebagai lembaga penegak hukum yang harus memerankan diri sebagai lembaga yang independen dan imparial akan dipertanyakan. Dimana hal ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap MK.

Di sisi lain, politik balas budi ini bisa jadi salah satu cara ampuh Jokowi memuluskan kekuasaannya. Ben Bland, peneliti dari *Lowy Institute*, mengambil contoh langkah Jokowi merangkul Prabowo. Baginya, upaya itu adalah pengkhianatan kepada demokrasi. Dengan diambilnya Prabowo, otomatis Partai Gerindra akan mendukung pemerintahan Jokowi; lantas siapa yang bisa menjadi oposisi yang “seharusnya ada dalam sistem demokrasi?”. “Ketika dia memilih Prabowo (sebagai Menteri Pertahanan), artinya sudah selesai,” kata salah satu pejabat kepada Bland seperti dikutip dalam *Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia* (2020). “Dia melakukan itu untuk melumpuhkan oposisi.”

### 2. Patologi Birokrasi dan Penyelewengan Kekuasaan

Patologi birokrasi merupakan penyakit yang terdapat dalam sistem birokrasi atau dengan kata lain kesalahan yang dilakukan oleh suatu oknum secara terus menerus hingga menjadi budaya menyeleweng dalam sistem birokrasi. Pada praktiknya kini nihil menemukan sistem birokrasi yang bersih dari patologi, dengan kata lain kebersihan birokrasi menjadi suatu agenda yang harus menjadi urgensi bagi para pemimpin saat ini, Sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita “penyakit birokrasi sekaligus”. Dalam paradigma *Actonian* menyatakan bahwa yang termasuk patologi birokrasi adalah *power tends to corrupt* atau menyelewengkan kekuasaan untuk melakukan kejahatan dalam birokrasi. Sesuai hal tersebut selain sistem birokrasi, patologi birokrasi juga dapat terjadi dalam

aparaturnya. Sebagai contoh kasus penyelewengan kekuasaan oleh Presiden Jokowi untuk mengubah batasan maksimal umur calon wakil presiden melalui keputusan MK yang diketahui adalah adik ipar Jokowi.

Menurut Caiden (1994), patologi birokrasi mencakup maladministrasi, korupsi, nepotisme, dan inefisiensi. Dalam konteks ini, putusan MK yang dipimpin oleh Anwar Usman, ipar Jokowi, menunjukkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk tujuan politik keluarga. Keputusan ini mengabaikan prinsip netralitas dan independensi lembaga hukum.

Pakar Hukum Universitas Hasanuddin turut mempertanyakan bagaimana kondisi demokrasi setelah disahkannya putusan ini. Sistem demokrasi pada dasarnya membutuhkan hukum untuk memberikan batasan dan menghindari adanya dominasi satu pihak akan pihak lainnya. Hubungan antara hukum dan politik ini tidak boleh dicampurkan dengan kepentingan politik tertentu. Sukri berpendapat, persoalan putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres tidak hanya berdampak pada pemilu tahun depan. Nantinya, akan ada banyak pihak yang beranggapan bahwa konsitusi dapat dikuasai oleh politik.

Tidak ada birokrasi yang menderita “penyakit birokrasi sekaligus”. Dalam paradigma *Actonian* menyatakan bahwa yang termasuk patologi birokrasi adalah *power tends to corrupt* atau menyelewengkan kekuasaan untuk melakukan kejahatan dalam birokrasi. Sesuai hal tersebut selain sistem birokrasi, patologi birokrasi juga dapat terjadi dalam aparaturnya. Contoh kasus terkini adalah penyelewengan kekuasaan oleh Presiden Jokowi untuk mengubah batasan maksimal umur calon wakil presiden melalui keputusan MK yang diketahui adalah adik ipar Jokowi.

### 3. Indikasi *Grand Corruption*

*Grand corruption* melibatkan skema penyalahgunaan wewenang dalam skala besar dan terorganisir. Berdasarkan hasil penelitian oleh Aulia, Salsabilla, dan Pitakon (2023) yang menyebutkan bahwa perubahan kebijakan oleh Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarga Jokowi memenuhi karakteristik *grand corruption*, karena menyangkut manipulasi institusi demi mempertahankan kekuasaan keluarga.

*Organized Crime and Corruption Reporting Project* (OCCRP) memasukkan Presiden Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam daftar nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. OCCRP menyejajarkan Jokowi dengan Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan Pengusaha dari India Gautam Adani, yang termasuk dalam daftar finalis tokoh terkorup pada tahun 2024. Nama Jokowi menjadi salah satu tokoh yang paling banyak dipilih dari lima finalis tahun ini (Tempo, 2025).

OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam dan mempunyai staf di enam benua. Organisasi ini menyebut dirinya sebagai ruang berita nirlaba berbasis misi yang bermitra dengan outlet media lain. Selain itu, sayap pengembangan media OCCRP diklaim membantu outlet investigasi dari seluruh dunia. Dilihat dari laman resmi OCCRP, bahwa Pimpinan sekaligus salah satu pendiri OCCRP, Drew Sullivan, yang mengungkapkan bahwa pemimpin negara yang korup tersebut perlu dipublikasikan karena mereka dinilai melanggar hak asasi manusia. Dia menyebut bahwa pemerintahan yang korup akan membuat konflik karena ketidakstabilan di suatu negara. Drew menyatakan nominasi didapat dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Pemerintah yang korup disebut menjalankan roda kepemimpinan dengan tindakan melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka, (Tirto, 2025).

Peneliti dari *Transparency International* Indonesia (TII), Bagus Pradana, menilai laporan dari OCCRP pasti memiliki basis riset yang kuat sebagai media jurnalistik investigatif. Maka hasil yang memuat Jokowi sebagai salah satu finalis tokoh terkorup seharusnya didasari metode penelitian dan penilaian kredibel. Sayangnya, kata Bagus, metode penelitian dan data dari OCCRP masih sulit untuk diakses secara lengkap untuk umum, (Tirto, 2025).

Definisi korup itu sendiri dapat diperluas, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan istilah aksi mencuri duit negara. Sebagai sebuah contoh, bahwa misalnya meliputi tindakan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, hingga praktik-praktik yang menggerus demokrasi. Bagus menilai, dalam konteks situasi di Indonesia hal itu terjadi lewat dugaan kecurangan pemilu. Pasalnya, kecurangan pemilu berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang rusak, melanggengkan dinasti politik, dan mengikis demokrasi.

Peneliti TII lainnya, Alvin Nicola berpendapat bahwa korupsi bukan cuma mencuri uang negara, namun lebih jauh meliputi apa yang dipraktikkan Jokowi selama kepemimpinannya sebagai sebuah tindakan *abuse of power*. Konteks ini yang juga dipotret oleh OCCRP, dan dinilai Alvin sudah valid secara metodologis. Pertanda penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan Jokowi dinilai sudah amat jelas dalam bentuk *weaponization of law*. Menurut Alvin, presidensialisme ala rezim Jokowi bukan hanya memanfaatkan hukum, tetapi juga mempersenjatakan hukum untuk kepentingannya. Hal ini bisa dilihat dari eksploitasi APH (Aparat Penegak Hukum) terutama KPK yang diduga untuk menyerang lawan politik. Selain itu, Jokowi dianggap sudah menggunakan kuasa eksekutif untuk memperdaya cabang kekuasaan lainnya (terutama peradilan) untuk kepentingan elektoral anak-anaknya. Terlebih, sering kali melucuti kekuatan oposisi menggunakan jerat ancaman hukum. “Bahkan dalam banyak kasus, laporan-laporan OCCRP seperti Panama Paper dahulu bisa jadi pintu masuk membuka kasus korupsi yang lebih jauh, (Tirto, 2025).

#### **4. Reaksi Publik dan Ancaman terhadap Demokrasi**

Hasil Penelitian dari Kusnadi, Leliana, Septian, dan Haikal, (2024) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap fenomena ini sangat negatif. Praktik dinasti dan *grand corruption* dianggap sebagai pengkhianatan terhadap nilai demokrasi dan meritokrasi. Penyatuan antara mitos Raja Jawa dan simbolisme kekuasaan memperkuat legitimasi politik yang bersifat feodalistik, bukan demokratis.

Persepsi publik, terutama di kalangan masyarakat Jawa, kehadiran Jokowi dan keluarganya dalam dunia politik sering dipandang sebagai bentuk transformasi dari mitos raja Jawa menuju bentuk kekuasaan yang lebih modern namun tetap berbasis pada garis keturunan. Jokowi, yang datang dari latar belakang yang sederhana dan tidak berhubungan langsung dengan kekuasaan tradisional, memberikan kesan bahwa mitos raja Jawa bisa beradaptasi dengan zaman. Cara yang dilakukan oleh beliau tidak hanya berjuang melalui narasi populisme, tetapi juga membentuk keluarga yang terlibat dalam politik, yang akhirnya menciptakan citra dinasti politik yang kuat, (Rahman, dan Nurhadi, 2024).

Fenomena Mitos raja Jawa menunjukkan bahwa meskipun terjadi modernisasi politik di Indonesia, elemen budaya tradisional tetap memengaruhi struktur kekuasaan dan penerimaan publik terhadap dinasti politik. Mitos raja Jawa memberikan landasan kultural yang memungkinkan penerimaan terhadap dinasti politik oleh sebagian masyarakat, meskipun praktik ini menimbulkan ancaman terhadap demokrasi, meritokrasi, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil. Sistem dinasti politik yang dapat memunculkan konflik kepentingan dan juga dapat menimbulkan ketimpangan akses kekuasaan, maka yang akan terjadi yaitu masalah yang berpotensi merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

Fenomena politik dinasti dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo mencerminkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan yang sistemik dalam tata kelola pemerintahan. Keterlibatan langsung anggota keluarga Presiden seperti Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, dan Bobby Nasution dalam politik elektoral, serta perubahan aturan hukum oleh Mahkamah Konstitusi yang secara langsung menguntungkan pihak keluarga, merupakan indikator kuat praktik patologi birokrasi dan *grand corruption*, (Adam, Nathaniel, Syambudi, Hidayat, dan Amali, 2020).

Melalui pendekatan teori *post-kolonial*, penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi politik Indonesia masih terjebak dalam nilai-nilai tradisional, di mana simbolisme kekuasaan seperti mitos “raja Jawa” digunakan sebagai legitimasi budaya bagi praktik politik dinasti. Hal ini berbahaya karena mengaburkan batas antara legalitas dan moralitas dalam demokrasi, serta mengancam prinsip meritokrasi.

*Grand corruption* dalam konteks ini tidak lagi terbatas pada tindakan korupsi finansial, melainkan juga mencakup penyalahgunaan struktur hukum, netralitas lembaga, dan demokrasi prosedural demi kepentingan politik keluarga. Keterlibatan Presiden Jokowi dalam nominasi tokoh kejahatan terorganisir versi OCCRP memperkuat narasi publik bahwa korupsi telah menjadi bagian terstruktur dari kekuasaan. Oleh karena itu, politik dinasti bukan hanya pelanggaran etika demokrasi, tetapi juga ancaman nyata terhadap keberlangsungan negara hukum yang adil dan akuntabel.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ACLIC KPK. 2025. 3 jenis korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasarkan-skala-dan-paparannya>
- Aulia, S.S., Salsabilla, & Pitakon, F.A. 2023. Analisis Politik Dinasti Jokowi dalam Lensa Patologi Birokrasi: Grand Corruption. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(5), 1044-1053. <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms>
- Ananda, R. 2023. Feodalisme Politik dan Demokrasi Semu. *Jurnal Demokrasi*, 10(2), 33-45. (SINTA 5)
- Adam, A., Nathaniel, F., Syambudi, I., Hidayat, R., & Amali, Z. 2020. *Dinasti Politik Keluarga Presiden Jokowi*. Tirto & Kurawal Foundation. <https://tirto.id>
- Caiden, G. E. 1994. *Administrative Reform Comes of Age*. Walter de Gruyter.
- Fatimatu Zahra, A. & Dewi, L. 2021. Demokrasi dan Nepotisme dalam Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(1), 55-68. (SINTA 5)
- Humas UMY. (2023, Oktober 25). *Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy>
- Kusnadi, E., Leliana, I., Septian, R., & Haikal, A. 2024. Mitos Raja Jawa dan Transformasi Dinasti Politik: Studi Keluarga Jokowi. *Komunikasi: Jurnal Komunikasi*, 15(2), 86-93. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/ doi:10.31294/jkom.v15i2.24498>
- Rahman, F. & Nurhadi, M. 2024. Narasi Raja Jawa dalam Politik Elektoral. *Tempo Research Journal*, 3(2), 10-22. (SINTA 5)
- Saiful Mujani Research and Consulting. 2023. *68 Persen Publik Percaya Jokowi Sedang Membangun Politik Dinasti*. Diakses dari <https://saifulmujani.com/68-persen-publik-percaya-jokowi-sedang-membangun-politik-dinasti>

- Sulaiman, K. F. 2023, Oktober 25. *Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY*. Retrieved from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: <https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy>
- Tempo. 2025, Januari 1. *OCCRP mengumumkan Jokowi dalam daftar finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024*. Retrieved from Tempo: <https://www.tempo.co/politik/profil-occrp-yang-memasukkan-jokowi-sebagai-finalis-tokoh-kejahatan-terorganisasi-dan-korupsi-2024-1188633>
- Tirto.id & Kurawal Foundation. (2020). *Dinasti Politik Keluarga Presiden Jokowi*. eBook. <https://tirto.id>
- Tirto.id. 2024, Desember 31. *Jokowi Masuk Daftar Nominasi Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP*. <https://tirto.id/jokowi-masuk-daftar-nominasi-finalis-tokoh-kejahatan-terorganisasi-dan-korupsi-2024-versi-occrp-ex2t6yyvjmugqdr87>